# BAB 1

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Kepentingan nasional sangat penting dalam hubungan internasional dan dimiliki oleh seluruh Negara di dunia. Adanya kepentingan nasional dalam suatu Negara maka tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh Negara tersebut dapat diwujudkan dengan dilakukan saling interaksi antarnegara melalui antarpemerintah negara. Dikutip dari buku *Tentang Ilmu Pertahanan*, kepentingan nasional Indonesia disusun dalam tiga kategori, yaitu: kepentingan nasional yang bersifat mutlak, kepentingan nasional yang bersifat vital, dan kepentingan nasional yang bersifat penting. Salah satu di antara sifat kepentingan nasional itu adalah kepentingan nasional bersifat vital. Kepentingan nasional yang bersifat vital menyangkut keberlanjutan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika, sejahtera, adil dan makmur, serta demokratis.[[1]](#footnote-1)

Kepentingan nasional yang bersifat vital menyangkut keberlanjutan pembangunan nasional salah satunya adalah masalah pangan. Pangan adalah kebutuhan pokok seluruh umat manusia dan hak semua orang untuk mendapatkannya. Pangan di Indonesia identik dengan beras yang setelah diolah menjadi nasi merupakan makanan pokok pangan sebagian besar masyarakat Indonesia, selain sagu, jagung, singkong dan ubi jalar. Indonesia adalah negara terbesar ketiga setelah Tiongkok dan India produsen beras di dunia. Lima produsen beras terbesar dunia adalah Tiongkok, India, Indonesia, Bangladesh dan Vietnam. Tiongkok memproduksi 208 juta ton produksi beras, India 155 juta ton, Indonesia 70 juta ton, Bangladesh 52 juta ton dan Vietnam 44 juta ton (Kompas, 2015).[[2]](#footnote-2) Indonesia termasuk Negara dengan konsumsi beras per kapita terbesar di dunia. Menurut data dari BPS (Badan Pusat Statistik), rata-rata orang Indonesia mengkonsumsi sekitar 114 kilogram beras per kapita per tahun. Sedangkan rata-rata konsumsi beras di Asia hanya 90 kilogram per kapita per tahun (Detik, 2015).[[3]](#footnote-3) Dibandingkan konsumsi beras di Indonesia dengan negara-negara lain di Asia mengkonsumsi beras lebih sedikit dari Indonesia, seperti Korea 40 kilogram, Jepang 50 kilogram, Malaysia 80 kilogram serta Thailand 70 kilogram per tahun (Merdeka, 2013).[[4]](#footnote-4)

Krisis beras di Indonesia terjadi karena berbagai macam faktor yaitu kenaikan harga beras dunia, perubahan iklim, El Nino, banjir serta faktor lainnya. Akibat dari krisis beras menyebabkan produksi beras menurun dan mengakibatkan mayoritas masyarakat kehilangan daya beli akibat harga beras yang mahal. Kejadian atau peristiwa yang menyebabkan beberapa kali Indonesia mengalami kesulitan mendapatkan beras terjadi pada 1997-1998 saat krisis moneter serta krisis ekonomi Asia, dan pada 2007 saat El Nino di Indonesia dan 2008 saat krisis ekonomi global.

Pada saat rejim Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto (1968-1998), melakukan pembangunan yang difokuskan pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dengan harapan pemerataan akan muncul dengan sendirinya sesuai dengan hipotesis “menetas ke bawah” (*trickle down*). Dengan strategi pembangunan makro seperti itu maka peningkatan pendapatan petani merupakan tujuan tersier. Pemerintah Orde Baru mengartikan stabilitas harga beras pada tingkat yang terjangkau (murah) sebagai indikator sempurna ketahanan pangan (Falcon dan Timmer, 1991). Berdasarkan tujuan dan paradigma tersebut maka strategi yang dipilih adalah strategi kembar dua atau *twin strategy* (Pearson dan Falcon, 1991; Pearson, Naylor dan Falcon, 1991; Simatupang, 1991), yaitu: (1) jangka pendek berupa stabilisasi harga beras pada tingkat yang terjangkau (beras murah dan stabil), dan (2) jangka panjang untuk swasembada mutlak. Strategi ini konsisten dan berkelanjutan hingga swasembada beras diraih pada tahun 1984.[[5]](#footnote-5)

Pada pertengahan tahun 1997 terjadi krisis ekonomi dan penurunan produksi beras akibat El Nino telah menyebabkan ketahanan pangan berada pada posisi yang sangat rawan. Akibat krisis, banyak industri yang tutup, pengangguran meningkat, daya beli rendah, sementara harga beras justru melonjak tajam. Impor pangan mengalami hambatan akibat rendahnya kepercayaan internasional terhadap kemampuan devisa Indonesia. Perilaku *panic buying* semakin sering dijumpai akibat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap jaminan suplai pangan.

Akibat El Nino produksi beras mengalami penurunan secara tajam pada tahun1997 dan 1998 masing-masing 3,34 persen dan 0,03 persen. Setelah swasembada beras tercapai pada tahun 1984, Indonesia kembali sebagai pengimpor berasyang besar pada tahun 1990an. Meskipun produksi beras masih naik pada tahun-tahun tertentu, namun karena kebutuhan yang terus meningkat maka impor masih dilakukan untuk menutup kekurangan produksi beras dalam negeri. Dampak ElNino sangat menekan suplai beras di pasar domestik yang masih defisit sehingga diperlukan impor yang lebih besar dari keadaan normal. Pada tahun 1998 jumlah impor mencapai 5,8 juta juta ton. Impor tersebut sebagian berasal dari impor komersial, pinjaman lunak (*soft loan*) dan hibah (*grant)* dari negara donor seperti Jepang, Thailand, Vietnam, Malaysia, Italia, Amerika Serikat.[[6]](#footnote-6)

Secara nasional, adanya impor tersebut dianggap sangat membantu penyediaan beras bagi masyarakat. Namun persoalan krisis pangan (*food crisis*) terutama beras belum teratasi karena banyak masyarakat yang tidak mampu membeli beras pada harga pasar yang pada Juli 1998 mencapai sekitar Rp 2.200 per kilogram (kg), atau 2,2 kali lipat dari harga pertengahan 1997. Operasi pasar murni (sebagai instrumen *general price subsidy*) dengan menjual harga beras Bulog sekitar 10-15 persen di bawah harga pasar dianggap tidak efektif meredam gejolak harga. Mulai Juli 1998 pemerintah menerapkan kebijakan baru berupa *targeted price subsidy* yang dikenal dengan Operasi Pasar Khusus (OPK) karena menyadari sulitnya akses penduduk miskin terhadap beras yang disediakan melalui pasar bebas. Dalam kebijakan ini, keluarga miskin yang rawan pangan diberikan jatah beras murah dengan harga Rp 1.000,- per kilogram, atau 54 persen dari harga pasar saat itu. Beras tersebut tidak disalurkan melalui pasar bebas karena bukan untuk tujuanstabilisasi, tetapi langsung diantar oleh petugas Dolog ketitik distribusi di desa-desaatau kelurahan tempat keluarga miskin tersebut berada. Setiap keluargamiskin mendapat jatah 20 kg per bulan. Jumlah ini sekitar 40 persen kebutuhanberas mereka dengan asumsi konsumsi beras perkapita 10 kilogram per bulan danjumlah anggota keluarga 5 orang.[[7]](#footnote-7)

Pemerintah Indonesia menggunakan dua cara untuk mencapai swasembada beras. Pertama, pemerintah mendorong para petani untuk meningkatkan produksi mereka dengan mendorong inovasi teknologi dan menyediakan pupuk bersubsidi, dan kedua, berusaha mengurangi konsumsi beras masyarakat melalui program seperti ‘satu hari tanpa nasi’ setiap minggu, sementara mempromosikan konsumsi makanan pokok lainnya. Program ini belum bisa berhasil karena jumlah produksi beras hanya sedikit meningkat dan sebagian besar masyarakat Indonesia menolak mengganti beras dengan makanan pokok lain.[[8]](#footnote-8) Setelah program swasembada beras yanghanya bisa berhasil tahun 1980an dan 2007-2008, impor beras kembali dilakukan dengan volume yang semakin meningkat. Tahun 1998 impor beras tercatat 6 juta ton beras, tahun 1999 mengimpor 3,7 juta ton serta masing-masing 1,5 juta ton tahun 2000 dan 2001. Tahun 2002, impor beras 2,5 juta ton.[[9]](#footnote-9)

Selain swasembada beras kebijakan pemerintah lainnya untuk mengatasi kekurangan beras adalah RASKIN (Beras untuk Rakyat Miskin). Pemerintah dalam sidang Kabinet tanggal 3 Juni 1998 telah memutuskan untuk membentuk Tim Pemantau Ketahanan Pangan yang prinsipnya merupakan *Food Crisis Center* (Pusat Penanggulangan Krisis Pangan). Langkah ini ditindaklanjuti dalam Rakor Ekuin tanggal 24 Juni 1998 yang membahas khusus mengenai mekanisme penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan, yang akhirmya sampai pada keputusan untuk melaksanakan program bantuan pangan melalui Operasi Pasar Khusus yang operasionalnya dilaksanakan oleh BULOG. Ada beberapa pertimbangan mengapa bantuan pangan ini diberikan dalam bentuk beras, antara lain karena beras merupakan pangan pokok mayoritas penduduk, dan porsi pengeluaran untuk pangan bagi penduduk miskin adalah cukup tinggi. Memang ada model bantuan lainnya yaitu dalam bentuk uang tunai, namun pola ini cukup rawan terhadap penyimpangan.[[10]](#footnote-10)

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul “**Kontribusi Impor Beras Thailand dan Vietnam dalam mengatasi Krisis Beras di Indonesia**”

## Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah serta uraian di atas, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketersediaan beras dalam mengatasi krisis beras di Indonesia?
2. Mengapa beras Thailand dan Vietnam berkontribusi menjadi pilihan impor beras Indonesia?
3. Bagaimana kebijakan pemerintah mengatasi krisis beras di Indonesia dengan kontribusi impor beras dari Thailand dan Vietnam?

## Pembatasan dan Perumusan Masalah

## Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti akan membahas **penyebab ketersediaan beras mengatasi krisis beras di Indonesia, penyebab kontribusi beras Thailand dan Vietnam menjadi pilihan impor beras Indonesia, dan kebijakan-kebijakan pemerintah mengatasi krisis beras di Indonesia dengan kontribusi impor beras dari Thailand dan Vietnam.**

## Perumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam menganalisa masalah berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka dirumuskan sebagai berikut: “**Bagaimana krisis beras di Indonesia dapat diatasi melalui kontribusi impor beras dari Thailand dan Vietnam?**”

## Tujuan dan Kegunaan Penelitian

## Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai berdasarkan rumusan masalah adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan memaparkan:

1. Mengetahui ketersediaan beras mengakibatkan krisis beras di Indonesia
2. Mengetahui beras Thailand dan Vietnam menjadi pilihan impor beras ke Indonesia
3. Mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah mengatasi krisis beras di Indonesia dengan impor dari Thailand dan Vietnam

## Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kepada pembaca tentang krisis beras di Indonesia serta pengaruhnya terhadap impor beras asing yang mungkin saja di masa depan akan mengalami masalah krisis beras nasional yang berkaitan dengan impor beras asing terutama dari Thailand dan Vietnam ke Indonesia.
2. Diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat untuk para pembaca tentang hal yang berkaitan dengan krisis beras dan impor beras asing serta diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi semua pihak terutama pemerintah dengan penelitian yang telah dibuat oleh penulis ini.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh mata kuliah semester 8 pada jurusan Hubungan Interasional FISIP UNPAS Bandung.

## Kerangka Teoritis dan Hipotesis

## Kerangka Pemikiran

Ilmu Hubungan Internasional merupakan sebuah cabang disiplin ilmu pengetahuan yang mengarahkan pada ruang lingkup dan konsep-konsep dasar disiplin ini.[[11]](#footnote-11) **Schwarzenberger**[[12]](#footnote-12) menyatakan bahwa:

**Ilmu Hubungan Internasional adalah bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional (*sociology of international relations*).**

Jadi, ilmu Hubungan Internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan sebagainya, seperti misalnya, perpindahan penduduk (imigrasi dan emigrasi), pariwisata, olimpiade (olah raga), atau pertukaran budaya (*cultural change*).

Sementara, di lain pihak, terdapat sarjana Hubungan Internasional yang justru ingin memperkecil ruang lingkup ilmu Hubungan Internasional dengan menekankan pada aspek politik dari hubungan antarnegara, yang dapat dipelajari melalui politik luar negeri Negara-negara yang bersangkutan. Secara khusus **Hoffman**[[13]](#footnote-13) menyatakan bahwa:

**Ilmu Hubungan Internasional sebagai subjek akademis terutama memperhatikan hubungan politik antarnegara.**

Menurut **Gardner**et al.,[[14]](#footnote-14) dalam *Theory of Cooperation* kerjasama didefinisikan sebagai setiap adaptasi yang telah berkembang, setidaknya sebagian, untuk meningkatkan keberhasilan reproduksi dari mitra sosial aktor. Dalam **Kamus Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama** yang diterbitkan oleh **Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional** tahun 2003 bahwa kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang (badan, pemerintah, dan sebagainya).

**Dalton E. Mc Farland** dalam bukunya *Management, principles and practices[[15]](#footnote-15)* mendefinisikan arti *cooperation* atau kerja sama sebagai berikut:

***Cooperation is the willingness of individual to help each other* (Kerja sama adalah kehendak daripada individu-individu untuk menolong satu sama lain).**

Kerja sama antarnegara memiliki berbagai dimensi atau jenis, yang paling utamanya adalah untuk menjaga kepentingan nasional suatu negaranya dalam kancah global agar tetap terjaga dan pada akhirnya kepentingan nasional tersebut tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh suatu Negara tertentu.[[16]](#footnote-16) Walaupun di sisi lain apabila tujuan nasionalnya tidak tercapai, berbagai kemungkinan akan terjadi mulai dari ketegangan sampai kepada terjadinya konflik atau lebih tinggi lagi eskalasinya adalah perang.

Menurut **Felix E. Oppenheim** dalam *National Interest, Rationality, and Morality[[17]](#footnote-17)* mendefinisikan konsep kepentingan nasional yaitu:

**Konsep kepentingan nasional mengacu pada tujuan kesejahteraan pemerintah nasional di tingkat internasional, seperti pelestarian independensi politik dan integritas teritorial. Rumusan kepentingan nasional telah menjadi identik dengan formula keamanan nasional.**

Menurut **Hans J. Morgenthau** mendefinisikan kepentingan nasional dalam *Politics Among Nations[[18]](#footnote-18)*sebagai:

**Konsep kepentingan nasional (*Interest)* didefinisikan sebagai istilah kekuasaan (*The Concept of Interest defined in Terms of power).***

Menurut **Undang-undang Republik Indonesia** nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan Pasal 1 ayat 1 menyebutkan perdagangan sebagai berikut:

**Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.**

Menurut **Departemen Statistik (Dsta) Bank Indonesia** bahwa definisi perdagangan internasional adalah:

**Perdagangan luar negeri menggambarkan transaksi ekspor dan impor barang dalam suatu periode tertentu yang terjadi antara penduduk Indonesia dengan bukan penduduk Indonesia.**[[19]](#footnote-19)

Definisi impor menurut **Undang-undang Republik Indonesia** nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan Pasal 1 ayat 13 menyebutkan bahwa:

**Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.**

Menurut **Marolop Tandjung** dalam buku *Aspek dan Prosedur Ekspor-Impor[[20]](#footnote-20)* bahwa:

**Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Transaksi impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia** impor adalah pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri. Berbagai macam barang atau komoditas bisa dilakukan dengan proses impor dari Negara lain ke dalam negeri. Pada umumnya impor lebih sering berkaitan dengan proses perdagangan seperti impor pangan yaitu beras, jagung, kedelai dan lain sebagainya.

Dalam **Kamus Besar Bahasa Indonesia** atau **KBBI**[[21]](#footnote-21)beras didefinisikan sebagai:

**Beras adalah padi yang telah terkelupas kulitnya (yang menjadi nasi setelah ditanak).**

Dalam **Kamus Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama**[[22]](#footnote-22)yang diterbitkan oleh **Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional** tahun 2003 beras didefinisikan:

**Beras adalah padi yang telah dikupas kulitnya untuk ditanak menjadi nasi.**

Menurut **Undang-undang Republik Indonesia** nomor 18 tahun 2012 tentang pangan Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa:

**Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertenakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.**

Ada pun pengertian pangan lainnya yang dinyatakan oleh **Bulog**[[23]](#footnote-23)bahwa:

**“Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa”.**

**Fearn-banks** (2007)[[24]](#footnote-24) dalam *Crisis Communications: A Casebook Approach* mendefinisikan krisis sebagai:

***A major occurrence with a potentially negative outcome affecting an organization, company, or industry, as well as publics, products, services or good name. It interrupts normal business transactions and can sometimes threaten the existence of the organization.***

Diterjemahkan: (Sebuah kejadian besar dengan hasil yang berpotensi negatif yang mempengaruhi organisasi, perusahaan, atau industri, serta publik, produk, jasa atau nama baik. Hal itu mengganggu transaksi bisnis normal dan kadang-kadang dapat mengancam eksistensi organisasi).

Sementara **W. Timothy Coombs** (1999:2) mendefinisikan krisis sebagai:

***An event that is an unpredictable, major threat that can have a negative effect on the organization, industry, or stakeholders if handled improperly.***

Diterjemahkan: (Sebuah kejadian yang merupakan, ancaman utama tak terduga yang dapat memiliki efek negatif pada organisasi, industri, atau pemangku kepentingan jika tidak ditangani dengan tepat).[[25]](#footnote-25)

## Asumsi-asumsi

Dari beberapa pemikiran-pemikiran tersebut di atas, maka penulis menarik beberapa asumsi untuk memperkuat hipotesis yang akan dimunculkan, yaitu:

1. Sebagai Negara agraris dan kaya akan sumber bahan-bahan pangan, Indonesia beberapa kali dilanda krisis beras yang mengakibatkan kerawanan dan kekurangan beras serta naiknya harga pangan yang menyulitkan masyarakat mendapatkan beras sehingga pilihan terakhir harus melakukan impor dari luar negeri khususnya Thailand dan Vietnam.
2. Sebagai Negara yang beberapa kali dilanda krisis beras seperti tahun 1997-1998 dan 2007-2008, penyebab terjadinya krisis pangan di Indonesia disebabkan oleh banyak hal diantaranya disebabkan melonjaknya harga pangan global, bencana alam dan perubahan iklim yaitu ENSO/El Nino Kawasan Selatan

## Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penulis yang sebenarnya akan diuji berdasarkan data yang dikumpulkan. Berdasarkan kerangka teoritis di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**“Dengan adanya impor beras dari Thailand dan Vietnam maka krisis beras di Indonesia dapat teratasi.”**

## Operasionalisasi Variabel dan Indikator

**Tabel 1.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis (Teoritik) | Indikator (Empirik) | Verifikasi (Analisis) |
| Variabel Bebas:Pilihan Indonesia Melakukan Impor Beras dari Thailand dan Vietnam agar Kebutuhan Beras Masyarakat Indonesia Terpenuhi | 1. Adanya penyebab atau alasan Indonesia mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam
2. Adanya alasan pemerintah setiap tahun mengimpor beras dibandingkan dengan memproduksi beras sendiri
3. Munculnya ketergantungan impor beras dari Thailand dan Vietnam
 | 1. Data (fakta dan rangka) mengenai adanya penyebab atau alasan Indonesia mengimpor beras Thailand dan Vietnam
2. Data (fakta dan rangka) mengenai adanya alasan pemerintah setiap tahun mengimpor beras dibandingkan dengan memproduksi beras sendiri
3. Data (fakta dan rangka) mengenai munculnya ketergantungan impor beras Thailand dan Vietnam
 |
| Variabel Terikat:Krisis Beras terjadi di Indonesia sehingga Menyebabkan Kerawanan dan Kekurangan Beras | 1. Munculnya daerah-daerah rawan dan kurang beras
2. Adanya program atau kebijakan pemerintah menangani kerawanan dan kekurangan beras
 | 1. Data (fakta dan rangka) mengenai adanya penyebab atau alasan Indonesia mengimpor beras Thailand dan Vietnam
2. Data (fakta dan rangka) mengenai adanya alasan pemerintah setiap tahun mengimpor beras dibandingkan dengan memproduksi beras sendiri
3. Data (fakta dan rangka) mengenai munculnya ketergantungan impor beras Thailand dan Vietnam
 |

## Skema Kerangka Teoritis

**Gambar 1. Bagan Kerangka Teoritis**

Impor Beras dari Luar Negeri

Vietnam

Thailand

Krisis Beras di Indonesia

Kerawanan Beras

Kekurangan Beras

## Metode dan Teknik Pengumpulan Data

## Tingkat Analisis

Penggunaan tingkat analisis dalam studi hubungan internasional penting dilakukan untuk memudahkan memilah-milah masalah yang paling layak ditekankan atau dianalisis, serta untuk menghindari kemungkinan melakukan kesalahan metodologis yang disebut *fallacy of composition* dan *ecological fallacy*.

Berdasarkan judul yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: “Pengaruh Krisis Beras Indonesia Terhadap Impor Beras dari Thailand dan Vietnam ke Indonesia”, maka penulis menggunakan tingkat analisis induksionis. Dimana variabel bebas atau independen (VB) dalam penelitian ini yaitu pengaruh *Krisis Beras Indonesia* dan variabel terikatnya (VT) terhadap *Impor Beras dari Thailand dan Vietnam ke Indonesia* yang berarti unit analisisnya berada pada tingkat yang lebih tinggi. Dikarenakan pembahasan masalah lebih banyak mementingkan tentang pengaruh Krisis Beras di Indonesia terhadap Impor Beras dari Thailand dan Vietnam ke Indonesia.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Metode penelitian deskriptif, digunakan apabila bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa atau kejadian yang ada pada masa sekarang. Metode deskriptif merupakan metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, menginterprestasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa data tersebut atau menganalisa fenomena tersebut serta suatu metode dalam meeliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Dalam metode deskriptif dipelajari masalah-masalah yang berlaku dalam masyarakat termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dengan metode ini dapat diselidiki kedudukan (status) fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara satu faktor dengan melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor lain. Selain itu juga menerangkan hubungan, menguji hipotesa-hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Termasuk dalam metode ini adalah studi kasus, survei, studi pengembangan dan studi korelasi.[[26]](#footnote-26)

## Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah studi kepustakaan atau literature (*Library research*). Studi kepustakaan dilakukan melalui penelaahan data terhadap buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, majalah berita, surat kabar, laporan lembaga pemerintah dan non pemerintah, maupun data-data yang terdapat dalam website atau internet.

## Lokasi dan Lamanya Penelitian

## Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi yang memiliki manfaat sumber informasi dan data-data yang dibutuhkan yaitu:

1. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan

Jln. Lengkong Besar No. 68 Bandung

## Lamanya Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dari awal hingga akhir sampai selesai dengan baik.

## Sistematika Penelitian

**BAB 1 : PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari pembahasan Latar Belakang Masalah, Pembatasan Msalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Hipotesis, Operasionalisasi Variabel dan Indikator, Skema Kerangka Teoritis, Tingkat Analisis, Metode dan Teknik Pengumpulan Data, Lokasi dan Lamanya Penelitian dan Sistematika Penelitian.

**BAB II : KONDISI BERAS DALAM NEGERI DAN YANG TERJADI DENGAN BERAS INDONESIA PADA SAAT TERJADINYA KRISIS BERAS**

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang kondisi beras di Indonesia dan yang terjadi pada komoditi beras Indonesia pada saat terjadinya krisis beras.

**BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG KRISIS BERAS DAN SEJARAH KRISIS BERAS DI INDONESIA**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai krisis beras di Indonesia dan sejarah umum impor beras Indonesia dari Thailand dan Vietnam.

**BAB IV : ANALISIS PENANGANAN KRISIS BERAS DI INDONESIA**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengaruh ketersediaan beras mengakibatkan krisis beras di Indonesia, alasan-alasan beras Thailand dan Vietnam menjadi pilihan impor beras yang dilakukan oleh Indonesia, dan kebijakan Pemerintah Indonesia mengatasi krisis beras di Indonesia dengan impor beras Thailand dan Vietnam.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini penulis menyimpulkan hasil analisis dan pembahasan dari penelitian, setelah itu berdasarkan hasil kesimpulan penelitian tersebut, penulis mencoba memberikan saran-saran sehubungan dengan pengaruh krisis beras Indonesia terhadap impor beras dari Thailand dan Vietnam ke Indonesia.

1. Juwono Sudarsono, *Buku Putih Pertahanan Indonesia,* Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, 2008,hal. 39-41 [↑](#footnote-ref-1)
2. Erlangga Djumena, “Ini 5 Negara Penghasil Beras Terbesar di Dunia”, 2015, diakses dari http://nasional.kompas.com/read/2015/09/02/095100026/Ini.5.Negara.Penghasil.Beras.Terbesar.di.Dunia?page=all [↑](#footnote-ref-2)
3. DetikFinance, “JK: Konsumsi Beras Orang Indonesia di Atas Rata-Rata Asia”,2015, diakses dari https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/2864707/jk-konsumsi-beras-orang-indonesia-di-atas-rata-rata-asia [↑](#footnote-ref-3)
4. Novita Intan Sari, “Konsumsi Beras di Indonesia Masih Tertinggi di Dunia”, 2013, diakses dari https://www.merdeka.com/uang/konsumsi-beras-di-indonesia-masih-tertinggi-di-dunia.html [↑](#footnote-ref-4)
5. Pantjar Simatupang dan I Wayan Rusastra, “Kebijakan Pembangunan Sistem Agribisnis Padi”, 2004, diakses dari http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/Anjak\_2004\_VI\_05.pdf [↑](#footnote-ref-5)
6. Agus Saifullah, “Peran Bulog Dalam Kebijakan Perberasan Nasional”, 2001, diakses dari http://bulog.co.id/data/doc/20070321aPapBulBer.pdf [↑](#footnote-ref-6)
7. Agus Saifullah, *Ibid*., hal. 5 [↑](#footnote-ref-7)
8. Indonesia Investments, “Beras”, 2016, diakses dari https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/beras/item183 [↑](#footnote-ref-8)
9. Mewa Ariani, “Dinamika Konsumsi Beras Rumah Tangga dan Kaitannya dengan Diversifikasi Konsumsi Pangan”, 2003, diakses dari http://new.litbang.pertanian.go.id/buku/ekonomi-padi-beras/BAB-VI-3.pdf [↑](#footnote-ref-9)
10. “BAB 1 Pendahuluan 1.1 Latar Belakang”, Gadjah Mada University (UGM) Theses and Dissertations Repository (Tesis dan Disertasi), (Tanpa Tahun), diakses dari http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/80874/potongan/S2-2015-325853-chapter1.pdf [↑](#footnote-ref-10)
11. Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011,hal.1 [↑](#footnote-ref-11)
12. GeorgSchwarzenberger, *Power Politics*. London: Prentice Hall, 1964, hal. 8 [↑](#footnote-ref-12)
13. Stanley Hoffman, (ed), *Contemporary Theory in International Relations*. New Jersey: Englewood Cliffs, 1960, hal. 6 [↑](#footnote-ref-13)
14. Andy Gardner, Ashleigh S Griffin dan Stuart A West, “Theory of Cooperation”, 2009, diakses dari https://pdfs.semanticscholar.org/d2d3/b0fde9a7c90e51906c98805a5f57b1fe4bfb.pdf [↑](#footnote-ref-14)
15. Dalton E. McFarland, *Management, principles and practices*, dalam Drs. Soewarno Handayaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, CV Haji MasAgung, Jakarta, 1990, hal. 90 [↑](#footnote-ref-15)
16. Makmur Supriyatno, *Tentang Ilmu Pertahanan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014, hal. 136 [↑](#footnote-ref-16)
17. Felix E. Oppenheim, “National Interest, Rationality, and Morality, Political Theory” Vol. 15, No.3 pp. 369-389, 1987,diakses dari https://www.jstor.org/stable/191209 [↑](#footnote-ref-17)
18. Hans J. Morgenthau, Kenneth W. Thompson (direvisi), S. Maimoen, A.M. Fatwan dan Cecep Sudradjat (penerjemah), *Politics Among Nations* (Politik Antarbangsa), Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010, hal. 6 [↑](#footnote-ref-18)
19. Bank Indonesia, “Perdagangan Luar Negeri”, 2014, diakses dari http://www.bi.go.id/id/statistik/metadata/sekda/Documents/6\_PerdaganganLuarNegeri\_v2.pdf [↑](#footnote-ref-19)
20. Marolop Tandjung, *Aspek dan Prosedur Ekspor-Impor,* Jakarta, Salemba Empat, 2011, hal. 379 [↑](#footnote-ref-20)
21. Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Beras”, (Tanpa Tahun), diakses dari https://kbbi.web.id/beras [↑](#footnote-ref-21)
22. Menuk Hardaniwait, Isti Nureni dan Hari Sulastri, *Kamus Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama*, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2003, hal. 60 [↑](#footnote-ref-22)
23. Bulog, “Ketahanan Pangan”, (Tanpa Tahun), diakses dari http://www.bulog.co.id/ketahananpangan.php [↑](#footnote-ref-23)
24. Kathleen Fearn-Banks, *Crisis Communications: A Casebook Approach,* Third Edition, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2007, hal.6 [↑](#footnote-ref-24)
25. W. Timothy Coombs, Information and Compassion in Crisis Responses: A Test of Their Effects, Journal of Public Relations Research, 1999, diakses dari http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/3249249/Coombs\_\_1999\_\_JPRR.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1492490614&Signature=RacDaRgeaoC8oMXxcFrfTCmWva8%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DInformation\_and\_Compassion\_In\_Crisis\_Res.pdf [↑](#footnote-ref-25)
26. Muhammad Nazir, *Metode Penelitian,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hal. Bab II [↑](#footnote-ref-26)